

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Coping with Physical Environment: The Case Studies of Low-Income Housing in Jakarta Sri Astuti Indriyati.....	257–268
Membuka Diri Setengah Hati: Ruang Keterlibatan Warga dalam Penyusunan APBD Bowo Sugiarto	269–276
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Diplomasi Indonesia dengan Tiga Negara ASEAN Peni Hanggarini & Retno Hendrowati	277–285
Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik Syarifuddin Iskandar Ardiansyah	286–292
Penanganan Keluhan Publik pada Birokrasi Dinas Perijinan Suryadi	293–303
Cerita Rakyat di Pulau Mandangin: Kajian Struktural Antropologi Claude Lévi Strauss Suhartono, Bambang Yulianto & Anas Ahmadi	304–311
Isu Ras dan Warna Kulit dalam Konstruksi Kecantikan Ideal Perempuan Ratih Puspa	312–323
Employees as the ‘Actor’ in Communicating the New Corporate Identity Nurul Ratna Sari	324–329
Karakter Maskulin Pemerintahan Bush Edi Dwi Riyanto	330–335

Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik

Syaifuddin Iskandar Ardiansyah¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB.

ABSTRACT

The presence of Balinese in Sumbawa Regency was caused by the urgency of economic conditions and the motivation to improve living standards. Gradually, the existence of Balinese began to influence the life of Samawa ethnic. These conditions eventually triggered the conflicts between the two ethnic groups. This research used qualitative approaches to understand the source and the trigger of conflict in socio-political aspects in order to settle the conflict between two ethnic groups. Results of data analysis concluded that the cause of conflicts was the emergence of social jealousy among ethnic Samawa. Many Balinese were high achievers and managed to get access from the central government, and gained important positions in the bureaucracy. It could be concluded that the conflicts between the two ethnic groups could be settled by coordination meetings involving the leaders of various ethnicities in Sumbawa, improving communication between the two ethnic groups, improving the awareness of problems, and beware of various forms of provocation.

Key words: conflict, ethnic, politic socia, resolution, social jealousy

Secara geografis kabupaten Sumbawa terletak pada posisi yang cukup strategis, yaitu berada pada segi tiga emas kawasan pariwisata antara pulau Bali, Lombok dan pulau Komodo. Kabupaten Sumbawa juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup potensial, yaitu berupa lahan pertanian dan peternakan dan telah ditetapkan sebagai lumbung padi dan daerah pengembangan ternak di NTB. Di samping itu, juga memiliki kekayaan hutan, flora dan fauna, mineral, pertambangan emas dan tembaga, industri dan sumber daya kelautan dengan panjang pantai mencapai 900 km. Luas wilayah darat mencapai 8.493 km² dan wilayah laut 4912,46 km². Jumlah penduduk seluruhnya 452.746 jiwa, (laki-laki 228.717 jiwa dan perempuan 224.029 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk asli (etnis Samawa) mencapai 68,66% selebihnya adalah berasal dari etnis Bali, Sasak (Lombok), Jawa, Sunda, Madura, Mbojo (Bima/Dompu), Bugis Makasar, Minang, Sumba/Timor, dan Arab.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, kabupaten Sumbawa cukup memiliki daya tarik bagi para pendatang, khususnya oleh warga etnis Bali yang datang mengadu nasib dan bekerja di kabupaten Sumbawa. Kehadiran etnis Bali di kabupaten Sumbawa, dilatarbelakangi oleh faktor migrasi, transmigrasi, dan karena keterdesakan

oleh kondisi ekonomi dan geografis di daerah asal, dengan motivasi ingin merantau, meningkatkan taraf hidup, mencari kerja, menjadi petani, peternak, pedagang/bisnis, mutasi jabatan pegawai, pejabat, dan sebagainya.

Dalam kurun waktu 10 tahun (1970–1980) etnis Bali berhasil unggul dalam mengakses sumber-sumber ekonomi, jabatan-jabatan penting di birokrasi (pemerintahan/swasta/BUMN). Lambat laun, keberadaan etnis Bali kemudian membawa warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat Sumbawa, di mana warga etnis Bali mulai menampilkan perilaku dan aktivitas sosial budaya dan adat Bali yang dianggap mencolok oleh warga etnis Samawa. Semua kondisi tersebut akhirnya menjadi sumber dan pemicu konflik antara etnis Samawa dengan etnis Bali yang puncaknya terjadi pada tanggal 17 November 1980. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sentral yang dikaji dalam penelitian ini yaitu apa faktor penyebab konflik etnis Samawa dengan etnis Bali ditinjau dari aspek sosial politik menurut perspektif konstruksi sosial masyarakat Sumbawa? Selain itu, akan ditelaah bagaimana upaya resolusi konflik yang ditempuh menurut perspektif konstruksi sosial masyarakat Sumbawa.

¹ Korespondensi: S. I. Ardiansyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar. Jalan Raya Sering Sumbawa Besar, Telepon: (0371) 23543; Faks: (0371) 625848. E-mail: dayukandar@gmail.com

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Untuk mengamati fenomena yang diteliti, digunakan metode pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research*), yaitu untuk memahami sumber dan pemicu konflik ditinjau dari aspek sosial politik yang berkembang serta upaya-upaya resolusi konflik antar kedua etnis, yang digali dan dihimpun berdasarkan perspektif emik para pelaku/saksi konflik maupun menurut tokoh masyarakat Sumbawa. Berdasarkan data yang didapat selanjutnya digunakan untuk merumuskan proposisi atau teori yang dikembangkan berdasarkan fakta lapangan (*grounded theory*). Proposisi atau teori yang dikembangkan didasarkan pada penafsiran atau pemahaman tingkat pertama (*the first order understanding*) menurut perspektif pelaku/saksi konflik. Selanjutnya dilakukan penafsiran tingkat kedua (*the second order understanding*) dengan menggunakan bahan baku dari penafsiran tingkat pertama, (Strauss, Anselm & Corbin 1997).

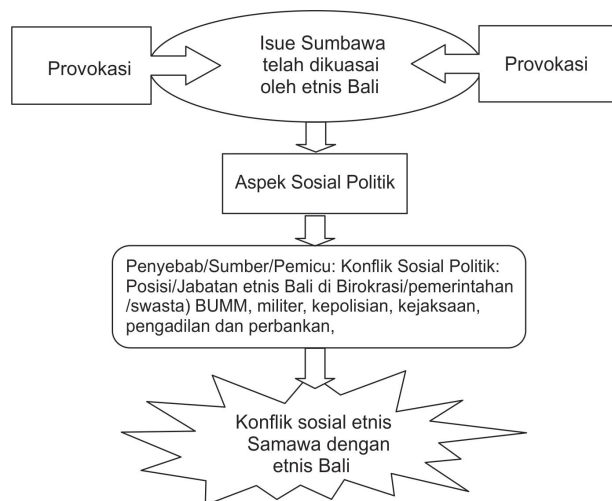
Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik: 1) lebih mementingkan pemahaman terhadap pemahaman para pelakunya sendiri (*understanding of understanding*) daripada penjelasan (*explanation*); 2) lebih tertuju untuk menggali dunia pemaknaan (*reason*) dalam perspektif emik atau perspektif pelaku, daripada mencari hubungan kausal; 3) lebih mementingkan kedalaman daripada keluasan cakupan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data paparan berupa: ucapan atau tulisan dan perilaku teramati, (dari kedua kelompok etnis Samawa dan Bali), termasuk terhadap segala peristiwa sosial politik yang berkaitan dengan konflik etnis Samawa dengan etnis Bali beserta latar belakang yang memengaruhinya.

Instrumen Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan interviu mendalam (*indepth interview*). Data yang berkaitan dengan keadaan/kondisi daerah/lokasi penelitian (data sekunder), dikumpulkan dengan menggunakan metode pencatatan dokumen. Sedangkan data tentang faktor sosial politik yang memengaruhi peristiwa konflik serta upaya resolusi konflik antar kedua etnis (data primer) dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara (*indepth interview*).

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*researcher as instrument*), dengan menggunakan alat bantu seperti perekam suara (*tape recorder*), perekam gambar (kamera foto), alat-alat tulis, lembar observasi dan panduan wawancara untuk merekam dan mencatat data tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan. Pengamatan fenomena dan pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan prosedur observasi, wawancara, dan dokumentasi secara simultan.

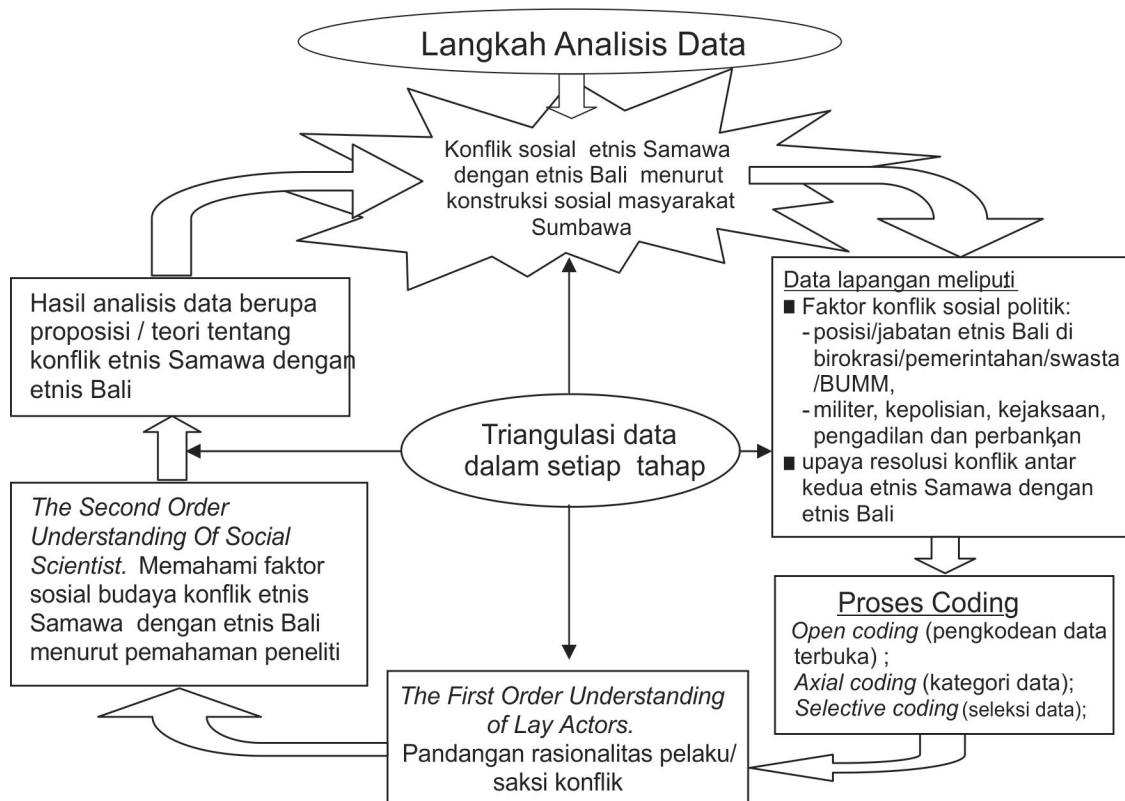
Skema 2.
Kerangka Satuan Pengamatan Konflik Sosial Politik Etnis Samawa dengan Etnis Bali



Metode Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang dilakukan secara simultan, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, komparasi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Selama pengumpulan data, dilakukan pengkodean data secara terbuka (*open coding*) untuk merinci, menguji, membandingkan, mengembangkan konsep, dan kategorisasi. Beberapa kategori (data) penting selanjutnya diberi kode khusus (*axial coding*), yaitu untuk menentukan hubungan dan kesesuaian antar kategori untuk kemudian dipadukan menjadi proposisi-proposisi yang perlu dikembangkan. Selanjutnya melakukan seleksi data (*selective coding*), yaitu untuk menyusun kategori inti (*core category*) secara sistematis yang dikaitkan dengan kategori-kategori lainnya sehingga menjadi proposisi/teori sebagai temuan penelitian.

Skema 3.
Kerangka Analisis Data Menurut *Grounded Theory*



Adapun langkah analisis data menurut grounded theory dapat dilihat pada skema 3 di atas ini:

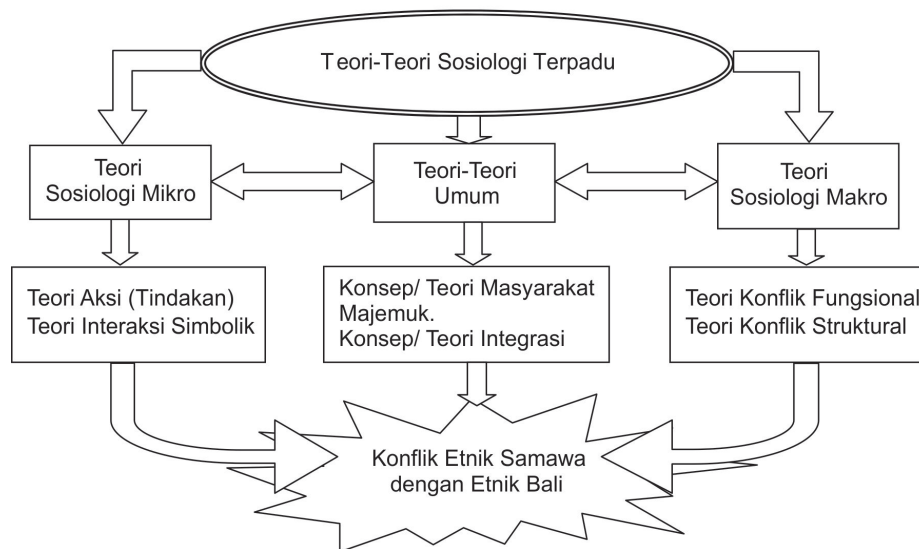
Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya mengkaji dan menganalisis peristiwa konflik etnis Samawa dengan etnis Bali tahun 1980, peneliti menggunakan kerangka analisis atau teori kerja menurut paradigma sosiologi terpadu (Ritzer 2002), yang terdiri dari perpaduan antara teori sosiologi makro dan teori sosiologi mikro. Adapun teori yang termasuk dalam mashab sosiologi makro antara lain: teori fungsional struktural (Durkheim; Parsons) dan teori konflik (Dahrendorf; Coser; Simmel), dan yang termasuk ke dalam mashab teori sosiologi mikro yaitu: teori tindakan/aksi (Weber; Cooley; Parsons); teori interaksi simbolik (Blumer; Mead). Di samping teori-teori tersebut, digunakan pula beberapa konsep, teori-teori umum yang relevan dengan masalah penelitian.

Berbagai konsep/teori yang termasuk dalam paradigma sosiologi terpadu ini digunakan mengingat fenomena konflik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: faktor sosial ekonomi, politik dan budaya masyarakat. Oleh karena itu diperlukan analisis yang komprehensif dengan berstandar pada paradigma sosiologi terpadu (Ritzer 2002) yang intinya terletak pada hubungan antara empat tingkat realitas sosial, yaitu: 1) makro-objektif, seperti: masyarakat, hukum, birokrasi, bahasa dan simbol-simbol; 2) makro-subjektif, seperti: kultur, nilai-nilai, norma-norma; 3) mikro-objektif, seperti bentuk-bentuk interaksi sosial dan pola tingkah laku: kerja sama, persaingan, konflik; dan 4). mikro-subjektif, yaitu berbagai konstruksi sosial masyarakat tentang realitas konflik, seperti proses berpikir, menginterpretasi dan memahami peristiwa konflik menurut konstruksi sosial masyarakat Sumbawa.

Berikut ini, dapat disusun skema kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini:

Skema 1.
Kerangka Teori Penelitian



Satuan Pengamatan dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian, maka satuan pengamatan atau jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 1) faktor penyebab konflik etnis Samawa dengan etnis Bali ditinjau dari aspek sosial politik; 2) pola resolusi konflik yang ditempuh menurut perspektif konstruksi sosial masyarakat Sumbawa.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka ditetapkan sumber data (informan), yang terdiri dari: 1) sumber data manusia, yaitu para pelaku/saksi konflik Sumbawa tahun 1980 dari kedua kelompok etnis yang mengetahui/memahami peristiwa konflik, antara lain: tokoh masyarakat/tokoh dan pemimpin formal; 2) sumber data non manusia, yaitu: data statistik; dokumen sejarah, foto-foto aktivitas etnis Samawa dan etnis Bali; sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

Konflik Sosial Politik Etnis Samawa dengan Etnis Bali

Dengan menggunakan metodologi dan teknik analisis kualitatif *grounded theory*, selanjutnya data yang berkaitan dengan fokus penelitian dianalisis dan dibahas dengan berbagai konsep/teori yang relevan untuk itu. Berdasarkan analisis data dapat dipahami bahwa sumber awal pemicu konflik, yaitu munculnya isu ketidakadilan, kecemburuan sosial dan prasangka di kalangan warga etnis Samawa, bahwa “Sumbawa telah dikuasai oleh etnis Bali”. Konflik akhirnya dipicu oleh perkelahiran pemuda Bali dengan pemuda Sumbawa, melebar ke kasus

kawin lari yang sering terjadi sepanjang tahun, sampai kepada terjadinya penembakan oleh oknum pejabat/aparat yang mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia, akhirnya memicu meletusnya konflik secara meluas pada tanggal 17 November 1980 (puncak amuk massa secara besar-besar di seluruh kota maupun di beberapa desa/kecamatan). Isu SARA (suku-agama-ras) berhasil dihembuskan oleh kelompok kepentingan yang ingin menjadi Bupati Sumbawa periode berikutnya. Kelompok ini memanfaatkan moment perkelahiran pemuda Bali dengan pemuda Samawa serta kasus kawin lari (selarian) antara pemuda Bali dengan gadis Samawa sebagai faktor pemicu.

Konflik pada aspek sosial/politik dalam hal ini adalah konflik yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan kepentingan individu/kelompok di bidang sosial/politik dan atau kekuasaan dari pihak yang berkonflik, (Kusnadi, 2002). Dalam konteks konflik etnis Samawa dengan etnis Bali, faktor penyebab konflik pada aspek sosial politik ini, karena munculnya kecemburuan sosial di kalangan warga etnis Samawa, di mana etnis Bali banyak yang berprestasi dan berhasil mendapat akses dari pemerintah pusat dalam menduduki jabatan-jabatan penting di birokrasi (pemerintahan/swasta/BUMN); sebagai anggota Muspida, ketua pengadilan negeri, kepala Kejaksaan negeri, danres, kepala PLN, kepala Telkom, kepala bank, kepala agraria, dan kepala asuransi, pejabat swasta, BUMN, dan lain-lain staf di bawahnya.

Pola kebijakan pusat di masa orde baru menimbulkan konsekuensi logis bagi daerah, antara lain: 1) hubungan pusat dan daerah yang

sentralistis; 2) pejabat-pejabat yang akan menduduki jabatan-jabatan teras dan strategis dikirim atau didrop dari pusat; 3) munculnya dan meningkatnya kemiskinan struktural. Semua ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial yang berlarut-larut bagi masyarakat di daerah-daerah. Kondisi ini masih juga dirasakan sampai sekarang, di mana dalam era reformasi dan otonomi daerah mestinya pemerintah pusat sudah memberi kesempatan kepada daerah untuk berkreasi secara mandiri.

Puncak dari ketidakpedulian dan dominasi pusat terhadap hak-hak masyarakat di daerah dapat dilihat paling tidak dari dua hal: 1) pejabat-pejabat yang akan duduk pada jabatan-jabatan teras dan strategis, seperti muspida di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, gubernur, bupati, kepala dinas, bahkan kanwil, kandep, sebagian besar dikirim/didrop dari pusat; 2) hancurnya tata nilai dan tradisi adat masyarakat setempat, karena kurangnya komitmen dan rasa memiliki dari para pejabat yang didrop dari pusat serta ketidakberdayaan masyarakat setempat melawan/menyuarakan hak-haknya karena kuatnya tekanan dari pemerintah waktu itu.

Dalam konteks konflik karena perebutan sumber-sumber kekuasaan yang terjadi di kabupaten Sumbawa waktu itu, di mana pejabat-pejabat Sumbawa dominan di pegang oleh etnis Bali yang hindu. Faktor ini kemudian memunculkan skenario bahwa Sumbawa harus dibuat kacau, dengan sasaran antara adalah etnis Bali serta sasaran kambing hitam adalah para elit kader pemimpin Sumbawa yang dikorbankan seolah-olah sebagai sutradara pelaku.

Dalam realitasnya setelah dilaksanakan pemilihan bupati baru, ternyata bupati yang terpilih pascakonflik adalah berasal dari kalangan ABRI. Sedangkan sang aktor yang dari awal dicurigai ingin menjadi bupati Sumbawa, ternyata tidak pernah dicalonkan oleh partai manapun. Kecurigaan terhadap ABRI waktu itu, ternyata berhasil ditepis oleh sang bupati ABRI yang baru terpilih, yaitu: dengan usaha dan kerja kerasnya ternyata berhasil membangun kabupaten Sumbawa secara signifikan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa sang bupati baru yang ABRI ternyata berhasil membangun kabupaten Sumbawa, baik itu pembangunan di bidang fisik, non fisik maupun dalam bidang keamanan yang waktu itu relatif stabil.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan proposisi/teori yang berkaitan dengan faktor penyebab konflik etnis Samawa dengan etnis Bali dalam aspek sosial politik, yaitu: Etnis pendatang cenderung lebih unggul dalam menduduki jabatan-jabatan penting

di birokrasi, karena berprestasi dan mendapat akses dari pemerintah pusat, sedangkan masyarakat setempat cenderung diabaikan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial sebagai sumber konflik di bidang sosial politik.

Upaya Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah upaya untuk membangun hubungan baru dan bertahan lama di antara kelompok etnis Samawa dengan etnis Bali yang pernah berkonflik, yaitu dengan mengacu pada berbagai strategi penanganan konflik yang berbasis komunitas etnis. Tujuannya adalah mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri konflik maupun mencari formula baru karena masih adanya berbagai perbedaan pemahaman terhadap sumber dan penyebab konflik. Atau dengan kata lain resolusi konflik adalah upaya pengelolaan keharmonisan hubungan di antara kelompok etnis yang pernah berkonflik.

Adapun beberapa upaya resolusi konflik etnis Samawa dengan etnis Bali yang ditempuh oleh berbagai kalangan pasca konflik, antara lain: 1) rapat koordinasi di tingkat muspida dengan melibatkan berbagai tokoh etnis yang ada di Sumbawa, khususnya dari etnis Bali dalam rangka meredam konflik yang lebih luas; 2) meningkatkan intensitas komunikasi antar etnis dan golongan dalam upaya mengantisipasi isu-isu yang sifatnya provokatif; 3) menindak tegas para pelaku dan otak kerusuhan melalui upaya mencari, menahan/menangkap serta menghukum sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku; 4) menghimbau kepada etnis Bali agar tetap tenang dan sabar dan untuk masa-masa yang akan datang dapat meninjau kembali pola penampilan adat/budaya yang tidak sesuai dengan tradisi/adat/budaya orang Sumbawa; 5) memberikan bantuan santunan untuk kebutuhan hidup sehari-hari kepada etnis Bali yang mengalami kerugian harta benda maupun jiwa.

Upaya resolusi konflik etnis Samawa dengan etnis Bali pascakonflik seperti disebutkan di atas, dilakukan dengan melibatkan tokoh dari kedua etnis yang ada di kabupaten Sumbawa, yaitu dalam upaya meningkatkan komunikasi budaya antar kedua etnis, mewaspadai berbagai bentuk isu dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, agar tetap menjaga rasa aman, dan kembali menjalin hubungan yang harmonis, saling pengertian dan toleransi.

Cara-cara mengatasi konflik adalah setiap masyarakat perlu mengembangkan manajemen resolusi konflik, yakni strategi penanggulangan

konflik yang tidak saja mencakup apresiasi terhadap konflik yang berwujud perilaku menerima perbedaan dan keanekaragaman, tetapi juga menstimulinya, lalu menyelesaikannya guna mewujudkan perbaikan-perbaikan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup sistem sosial.

Penerapan manajemen resolusi konflik berkaitan dengan pemahaman tentang sumber konflik, di mana konflik bisa bersumber pada perebutan sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, prestise dan atau sumber daya kekuasaan yang berbaur dengan dualisme kultural yang tercermin dari pemberlakuan paham kekitaan dan kemerekaan yang diperkuat dengan etnosetrisme, fanatisme agama, dan elemen kultural yang lainnya, baik sebagai penguat identitas etnis maupun pelegitimasi konflik. Namun di sisi lain, walaupun ada sumber konflik, namun mereka belum tentu berkonflik, melainkan bisa saja mereka berintegrasi.

Sebagai implementasi nyata dari konsep/teori di atas, dapat dilakukan dengan cara pembentukan kelompok sosial antar etnis yang menyilang dan memotong, atau pola kehidupan yang berkomplementer, yaitu melalui pembentukan forum komunikasi antar etnis yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi budaya masing-masing dalam rangka memelihara saling pengertian dan toleransi.

Sebagaimana temuan Atmadja (2002) bahwa walaupun hubungan antaretnis pada desa-desa multietnis tampak terintegrasi secara baik, namun di balik itu selalu ada sumber-sumber konflik yang bisa melahirkan konflik latent atau bahkan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi konflik terbuka dengan kekerasan kolektif. Namun secara faktual tidak ada masyarakat yang membiarkan dirinya secara terus-menerus terlibat dalam konflik, apalagi konflik dengan kekerasan, karena konflik bisa mengganggu kebutuhan dasar manusia akan keamanan.

Berkenaan dengan itu tidak mengherankan jika setiap masyarakat mengembangkan manajemen resolusi konflik berbasis komunitas. Apa yang mereka lakukan, dengan meminjam Giddens (1999) merupakan energi lokal yang sangat bermanfaat bagi penanggulangan konflik, baik secara preventif maupun kuratif. Hal ini tidak semata-mata karena apa yang mereka lakukan terbukti bisa mengendalikan konflik, tetapi juga karena masyarakat politik tidak bisa melakukan segalanya tanpa dibantu oleh masyarakat lokal.

Kelangsungan hidup manajemen konflik berbasis komunitas tidak bisa dilepaskan dan kesepakatan akan sistem budaya fundamental koordinatif yang

bersumber pada budaya nasional, agama, dan kearifan lokal yang antara lain menekankan pada nilai-nilai universal, seperti toleransi, solidaritas sosial kasih sayang dll. Namun apa yang ideal secara tekstual, secara kontekstual belum memadai, karena adanya kendala yang bersumber pada paham kekitaan dan kemerekaan, politik othering, etnosetrisme eksklusivisme keagamaan, fundamentalisme agama, dll, sehingga konflik antar etnis maupun antar agama, baik yang bersifat konflik latent maupun konflik terbuka sulit dihindari.

Dalam hal ini, tujuan resolusi konflik yaitu dalam rangka tetap memelihara persatuan dan integrasi antar etnis. Upaya integrasi ini dalam rangka mempertemukan kepentingan antar kelompok etnis Samawa dengan etnis Bali yang pernah bertikai, agar di masa-masa yang akan datang tetap dapat menjalin harmonisasi secara bersama-sama baik itu dalam menjalankan aktivitas keagamaan, kegiatan ekonomi, perkawinan, pendidikan, hidup berkeluarga dan bertetangga, semuanya perlu didasarkan pada sikap toleransi antar sesama etnis, golongan maupun agama. Selain itu, hubungan yang sifatnya sementara dalam membangun hidup bermasyarakat juga perlu dibangun melalui kegiatan saling bertamu, makan bersama, saling menawarkan, dan tolong menolong/gotong-royong dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan. Wadah yang diperlukan untuk memelihara hubungan yang harmonis, dapat dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi lintas etnis/agama, sehingga komunikasi budaya antar etnis dapat berlangsung secara efektif.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan proposisi/teori yang berkaitan dengan upaya resolusi konflik etnis Samawa dengan etnis Bali, yaitu: jika kelompok etnis saling memiliki kesadaran dan sikap positif antara satu dengan yang lainnya, maka hubungan antar etnis cenderung diwarnai oleh rasa keguyuban dan kerukunan yang saling menguatkan, sehingga bisa menjadi modal utama untuk mencapai resolusi konflik antar etnis.

Simpulan

Faktor penyebab konflik etnis Samawa dengan etnis Bali ditinjau dari aspek sosial politik disebabkan karena munculnya kecemburuan sosial di kalangan warga etnis Samawa, di mana etnis Bali banyak yang berprestasi dan berhasil mendapat akses dari pemerintah pusat dalam menduduki jabatan-jabatan penting di birokrasi (pemerintahan/swasta/BUMN); sebagai anggota muspida, ketua pengadilan negeri, kepala Kejaksaan negeri, danres, kepala PLN, kepala

Telkom, kepala bank, kepala agraria, dan kepala asuransi, pejabat swasta, BUMN, dan lain-lain staf di bawahnya. Upaya resolusi konflik etnis Samawa dengan etnis Bali pasca konflik dilakukan melalui rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai tokoh etnis yang ada di Kabupaten Sumbawa, meningkatkan komunikasi budaya antar kedua etnis, mewaspadaikan berbagai bentuk isu dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, agar tetap menjaga rasa aman, dan kembali menjalin hubungan yang harmonis, saling pengertian dan toleransi.

Daftar Pustaka

- Atmadja, NB, (2002) Manajemen Konflik pada Masyarakat Desa Adat Multietnis di Kabupaten Buleleng Bali. Singaraja: IKIP Negeri Singaraja.
- Giddens, A (1999) *Beyond Left and Right*, Tarian “Idiologi Alternatif” di atas Pusara Sosialisme dan Kapitalisme. Yogyakarta: IRCISoD.
- Kusnadi, H HMA (2002), *Masalah, Kerjasama, Konflik dan Kinerja (Kontemporer & Islam)*. Malang: Taroda.
- Miall, Hygh OR & Tom W (1999) *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Ritzer, G (2002) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: CV Rajawali Pers.
- Strauss, Anselm and Juliet C (1997). *Basics of Qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Techniques*. Surabaya: Bina Ilmu.